

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOVITSON MAKISAKE
SONNY ROMPAS
VERRY .LONDA

Abstract: The majority of women are still confined within the limitations or poverty , whether caused by structural poverty , cultural and natural . If when viewed from the standpoint of structural poverty , the poverty caused by discriminatory policies or regulations , it is the reality of women's groups to be marginalized . This is evident from the persistence of the treatment was discriminatory , either in the provision of access to education , economic access (including access to the world of work , salary , access to the distribution of economic independence) , as well as access in the political field .

The research method is basically determined by the research question . Based on the research questions , the research was conducted using qualitative and quantitative research methods . Qualitative research methods focus to see the pattern of the empowerment of women coastal conducted by the District Government of Sangihe while quantitative method for measuring the success of the results (intermediate outcomes) women's empowerment programs coast at the same time to see the impact (final outcomes) change perceived by women after getting the programs carried out by the Technical Implementation Unit of PNPM Mandiri , especially in improving the living standards of families of women who benefit from the program.

Results of analysis of data obtained from the results of Questionnaire (questionnaire) to 60 respondents women / mothers of households spread across three sample villages in the subdistrict of West Tahuna Regency of Sangihe Islands . Results of the study are presented in three parts: the first part , presenting the results of research concerning the description of women's empowerment factors , which include : (1) educational factors ; and (2) factors training / skills ; The second part , presenting the results of research on the condition of the family living standards ; while the third section presents the results of statistical analysis and discussion of the influence of factors of women's empowerment on the condition of the living standards of families .

Keywords : Coastal Women's Empowerment Policy .

PENDAHULUAN

Di Indonesia sebagian kaum perempuan masih terkungkung dalam keterbatasan atau kemiskinan, baik yang disebabkan oleh kemiskinan struktural, kultural dan alamiah. Apabila jika dilihat kemiskinan dari sudut pandang struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan kebijakan atau peraturan yang diskriminatif, maka secara realitas kelompok perempuan merupakan kelompok yang termarginalkan. Hal ini terlihat dari masih adanya perlakuan yang masih diskriminatif, baik dalam pemberian akses pendidikan, akses ekonomi (termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji,

akses pendistribusian kemandirian ekonomi), serta akses di bidang politik.

Posisi ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan dalam posisi yang tidak berdaya, terutama bagi perempuan miskin yang ada di wilayah pesisir. Fakta tersebut didukung oleh data tingkat keberhasilan pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) di Indonesia yang masih jauh dari kata "berhasil".

Hasil laporan Human Development pada Tahun 2007, indeks pembangunan manusia (HDI) di Indonesia menduduki peringkat 107, jauh dibawa Cina pada peringkat 81, Philipina 90, Thailand 78 dan Malaysia 63. Ini berarti bahwa Indeks

Pembangunan Manusia Indonesia, termasuk di dalamnya adalah “perempuan” paling rendah di lingkungan kawasan Asia.

Fakta tersebut mengindikasikan sebetulnya faktor apa lagi yang menjadi ganjalan dalam menyetarakan gender di negara ini. Darwin (2005 : 64) mengatakan bahwa sumber permasalahan lain yang menyebabkan kebijakan kesetaraan gender tidak begitu maksimal adalah budaya patriarki. Dia menyebutkan bahwa budaya inilah sebagai penyebab terjadinya diskriminasi, marginalisasi, pelecehan, eksploitasi akibat sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem risorsi bias gender, sistem pembagian kerja, dan sistem kepemilikan. Budaya ini juga yang memberi pembenaran terhadap penguasaan atau superioritas laki-laki atas perempuan, budaya seperti ini ditemukan hampir di semua sejarah peradaban manusia. Secara tradisional manusia diberbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarki. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan baik di sektor domestik maupun publik. Hegemoni ini mendapat legitimasi dan nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, serta terisolasi secara turun temurun dari generasi kegenerasi.

Perempuan dalam kehidupan yang seakan dilanda ketidakmerdekaan dan dibebani masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sudah barang tentu menjadi problema ketidakberdayaan dalam sisi ruang yang berbeda. Oleh karenanya, fakta tersebut membuat perempuan mencari alternatif pekerjaan yang bersifat informal. Pekerjaan yang sering dilakukan adalah usaha mikro, yakni menjalankan usaha secara kecil-kecilan. Istilah lazimnya adalah unit usaha mikro. Usaha ini memerlukan sedikit modal (kadang tanpa modal). Produk yang sering digeluti adalah makanan, nyamikan, dan barang kerajinan tangan.

Apabila dilihat kontribusi perempuan dalam menggerakkan ekonomi rakyat yang

sangat bermakna dalam pembangunan nasional maka perempuan menempati 60 % pengusaha mikro, kecil dan menengah. Namun kondisi tersebut belum begitu menggembirakan. Kendala terbesar yang dihadapi oleh perempuan pengusaha mikro umumnya pada aspek pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi serta rendahnya penguasaan perempuan pada aset produksi (Anonimous, 2007).

Bagi perempuan pesisir, yang sebagian suami mereka bekerja sebagai nelayan tangkap di pesisir Kecamatan Tahuna Barat mengerjakan aktivitas sebagai penjual ikan hasil tangkapan sumunya atau membeli ikan dari nelayan lain untuk menjajakan di pasar tradisional Tahuna. Selain itu, ada sebagian dari perempuan pesisir mengolah ikan yang mungkin tidak habis terjual untuk membuat ikan asin atau ikan asap. Namun demikian, mereka sering mengalami kesulitan dari aspek permodalan dan pengetahuan tentang teknik pemasaran, persaingan dengan pengusaha pemilik modal dan teknik pengolahan ikan asin dan ikan asap yang lebih berkualitas.

Untuk mengatasi kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialami perempuan pesisir sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka pemerintah mengimplementasikan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dulunya dikenal dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (P2KP), namun hasilnya belum efektif atau belum berdampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup keluarga mereka.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.03 Tahun 2009 Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dengan adanya kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir melalui program usaha ekonomi produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut diharapkan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan taraf hidup keluarga

mereka. Untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan atau taraf hidup keluarganya, maka penelitian ini dipandang urgen untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya ditentukan oleh pertanyaan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hal ini sesuai dengan saran dan kritik para peneliti sosial atas penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif dan cenderung gagal melahirkan pemikiran teoritis baru. Dalam banyak hal kedua bentuk data tersebut diperlukan, bukan kuantitatif menguji kualitatif melainkan kedua bentuk tersebut digunakan bersama dan apabila dibandingkan masing-masing dapat digunakan untuk keperluan menyusun teori. Metode ini juga diperlukan untuk memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti dapat dilakukan usaha menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif Singarimbun dan Effendi, 1995).

Metode penelitian kualitatif lebih memfokuskan untuk melihat pola kegiatan pemberdayaan terhadap kaum perempuan pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Unit Pelaksana Teknis PNPM Mandiri Perdesaan secara deskripsi faktual yang terjadi di lapangan, sedangkan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur keberhasilan hasil (*intermediate outcomes*) program pemberdayaan perempuan pesisir sekaligus melihat dampak (*final outcomes*) perubahan yang dirasakan oleh perempuan setelah mendapatkan program-program yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis PNPM Mandiri tersebut, terutama dalam meningkatkan taraf hidup keluarga kaum perempuan yang mendapatkan manfaat program tersebut.

B. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini, terdiri dari : (1). Kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir sebagai variabel bebas atau independent variable (X) dan (2). Taraf hidup keluarga sebagai variabel terikat atau dependent variable (Y). Secara konseptual dan operasional kedua variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut :

1. Sebagai variabel bebas, pemberdayaan perempuan pesisir (X), dimaksud adalah ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah pesisir yang menerima manfaat kebijakan/program pemberdayaan, terutama melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Kebijakan pemberdayaan perempuan meliputi dua program, yaitu :

a. Pemberian pelatihan/ketrampilan, selanjutnya disebut sebagai variabel bebas satu (X_1), dimaksudkan adalah jenis-jenis pendidikan non-formal, seperti : pelatihan, kursus-kursus keterampilan, penataran, pembinaan dan sejenisnya yang pernah diikuti oleh responden, baik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk PKK maupun oleh pihak lain. Variabel ini diukur dari beberapa indikator, antara lain :

- 1) Frekuensi keikutsertaan responden dalam kegiatan pelatihan/ keterampilan;
- 2) Banyaknya jenis kegiatan pelatihan (termasuk kursus-kursus, penyuluhan, pembinaan, dll) yang diikuti responden;
- 3) Lamanya (dalam hari) responden mengikuti kegiatan pelatihan tersebut;
- 4) Ada-tidaknya manfaat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan/ keterampilan.

b. Pemberian bantuan modal usaha, selanjutnya disebut sebagai variabel bebas dua (X_2), dimaksud adalah pemberian dana bantuan atau pinjaman bagi peningkatan usaha guna meningkatkan/memperbaiki kondisi sosial-ekonomi/kesejahteraan keluarga, terutama bagi kelompok perempuan melalui program Simpan Pinjam Perempuan

(SPP). Variabel ini diukur dari besarnya dana bantuan/pinjaman yang diterima responden (dalam rupiah).

2. Sebagai variabel terikat, taraf hidup keluarga (Y) didefinisikan sebagai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya keluarga perempuan pesisir yang mendapat manfaat program pemberdayaan, yang berwujud kemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup anggota keluarga. Secara konkrit, kondisi sosial-ekonomi keluarga tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar minimum dari pada keluarga (seperti kebutuhan akan makan, pakaian, perumahan, kesehatan);
- b. Tingkat terpenuhinya kebutuhan sosial-psikologis anggota keluarga (seperti pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan lainnya);
- c. Tingkat terpenuhinya kebutuhan perkembangan (seperti : menabung, memperoleh informasi, transportasi, perluasan kegiatan usaha dan lainnya);
- d. Tingkat terpenuhinya kebutuhan sosial kemasyarakatan (seperti ikut serta dalam kegiatan masyarakat, kegiatan keagamaan, kegiatan pembangunan di desa dan lainnya).

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga keluarga nelayan pesisir, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Mengingat besar populasi belum diketahui, maka ditarik anggota sampel ditetapkan secara purposive sebesar 60 orang yang mendapat manfaat program pemberdayaan yang terdistribusi ke dalam 3 (tiga) kelompok penerima bantuan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

D. Teknik Pengumpulan Data

- Kuesioner

- Observasi
- Wawancara

E. Teknik dan Desain Analisis Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik analisis evaluasi program, yaitu *single program after only* dan *single program before-after*. Untuk *single program after only* digunakan untuk mengevaluasi hasil program (*intermediate outcomes*), sedangkan *single program before-after* digunakan untuk melihat dampak (*final outcomes*) yang dirasakan oleh kelompok sasaran penerima manfaat program (perempuan pesisir) dalam peningkatan taraf hidup keluarga/rumah tangga mereka dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya atau teknik analisis evaluasi dengan melihat kondisi ekonomi atau taraf hidup keluarga antara sebelum dan sesudah terintervensi oleh program tersebut, apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak.

Untuk menguji hipotesis, maka teknik analisis data yang digunakan terdiri dari :

1. Untuk menguji hipotesis nomor 1 dan 2, digunakan analisis regresi sederhana (regresi parsial dan dilanjutkan dengan analisis korelasi *product moment*, kemudian menghitung besarnya koefisien determinasi untuk melihat besarnya dampak dari kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir.
2. Untuk menguji hipotesis nomor 3, digunakan teknik analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan analisis korelasi berganda, kemudian dihitung koefisien korelasi berganda untuk mengetahui besarnya kontribusi/dampak secara simultan faktor-faktor pemberdayaan perempuan nelayan pesisir terhadap taraf hidup keluarga.

3. Untuk menguji hipotesis nomor 4, digunakan teknik analisis kesamaan dua rata-rata atau uji dua pihak (uji-t atau t-test).

4. Hipotesis dapat diterima, apabila hasilnya signifikan pada taraf uji 1 %.

5. Semua analisis dibantu dengan program SPSS versi 20 for windows.

A. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Aspek-aspek pemberdayaan perempuan yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari faktor pelatihan/keterampilan (X_1) dan faktor pemberian modal usaha (X_2). Untuk tujuan pengujian hipotesis, maka dalam bagian ini akan dikemukakan hasil analisis data sekaligus pembahasan tentang pengaruh/dampak semua variabel bebas secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel tak bebas (taraf hidup keluarga) perempuan/ibu rumah tangga, yang disajikan secara berurutan sesuai urutan hipotesis, sebagai berikut :

1. Dampak Kebijakan Pemberdayaan perempuan dari Aspek Pemberian Pelatihan/Keterampilan terhadap taraf Hidup Keluarga

Hipotesis 1 menyatakan bahwa “Kebijakan pemberdayaan perempuan dari aspek pemberian pendidikan/keterampilan berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup keluarga di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.”. Hasil analisis regresi parsial, diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 7,769 + 1,320X_1$. Setelah dilakukan uji keberartian koefisien regresi dengan menggunakan statistik-t dan uji model regresi dengan menggunakan statistik-F (uji keragaman), diperoleh harga t-hitung = 21,357 jauh lebih besar dari t-tabel = 2,660, dan harga F-hitung = 456,11 jauh lebih besar dari harga F-tabel = 7,08, pada taraf signifikansi 1 %. Dengan demikian hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa

hipotesis 1 secara meyakinkan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1%, sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan fungsional variabel pelatihan/keterampilan dengan taraf hidup keluarga berpola linear positif. mempunyai kecenderungan mengikuti garis Y duga (Y prediksi), sehingga membenarkan hasil temuan bahwa taraf hidup keluarga (Y) merupakan fungsi dari faktor pelatihan/keterampilan (X_1) atau secara matematis $Y = f(X_1)$. Ketergantungan taraf hidup keluarga (Y) atas pelatihan/keterampilan (X_1) diperlihatkan dari hasil koefisien determinasi (r^2), yakni sebesar 0,887 atau 88,7% kontribusi pelatihan/keterampilan terhadap taraf hidup keluarga dan sisanya sebesar 11,3% ditentukan oleh faktor lain.

Setelah mengetahui adanya hubungan fungsional antara kedua variabel yang berpola linear positif dan kontribusi X_1 terhadap Y yang sangat signifikan, maka dapat dilanjutkan dengan mencoba melakukan prediksi Y apabila harga X_2 dimanipulasi (dinaik-turunkan). Mengacu pada instrumen yang dikembangkan, di mana skor ideal (skor maksimal) variabel pelatihan/keterampilan adalah 30, kemudian disubstitusikan skor X_1 tersebut ke dalam persamaan regresi di atas, maka taraf hidup keluarga $\hat{Y} = 7,769 + 1,320(30) = 7,769 + 39,6 = 47,37$. Ternyata pelatihan/keterampilan ditingkatkan hingga maksimal, maka kondisi taraf hidup keluarga akan naik dari 36,67 (73.34 %) menjadi 47,37 (94.74 %). Tetapi perlu diketahui walaupun pelatihan/keterampilan ditingkatkan hingga maksimal (skor teoritik), ternyata kondisi taraf hidup keluarga perempuan nelayan tidak bisa maksimal. Hal ini berarti terdapat pula faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi taraf hidup keluarga itu sendiri.

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dibenarkan oleh beberapa pendapat para ahli, di antaranya, Moenir (1988) menyatakan, keterampilan adalah suatu keadaan pada seseorang yang dalam mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat serta hasilnya memenuhi mutu yang dipersyaratkan. Kemampuan demikian itu dapat dimiliki tiap orang melalui pengalaman, pengetahuan dan kesungguhan. Gabungan ketiga syarat inilah yang akan menentukan seseorang terampil atau tidak. Sehubungan dengan peranan pendidikan nonformal, seperti pelatihan/keterampilan, Herbison (1974) mengatakan bahwa sungguhpun pendidikan nonformal itu barangkali merupakan salah satu yang paling tidak sistematis dari suatu sistem yang ada, namun di hampir semua negara-negara berkembang peranannya dalam menggerakkan keterampilan-keterampilan, mempengaruhi sikap-sikap, serta membentuk nilai-nilai, bila tidak lebih besar maka adalah sama penting dengan pendidikan formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan/keterampilan kepada kaum perempuan, terutama para ibu rumah tangga nelayan akan dapat merubah sikap dan perilaku mereka kearah yang lebih produktif dalam menekuni suatu pekerjaan guna membantu suami dalam berupaya memperbaiki kondisi taraf hidup keluarga mereka.

2. Dampak Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dari Aspek Pemberian Bantuan Modal Usaha Terhadap Taraf Hidup Keluarga

Hipotesis 2, berbunyi “Kebijakan pemberdayaan perempuan dari aspek pemberian modal usaha berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup keluarga di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.”. Hasil analisis regresi parsial (regresi sederhana) diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = -18,226 + 0,071X_2$. Setelah dilakukan uji keberartian koefisien

regresi, diperoleh $t_{hitung} = 17,575$ jauh lebih besar dari $t_{tabel} = 2,660$, dan uji model regresi, didapat $F_{hitung} = 308,87$ jauh lebih besar dari harga $F_{tabel} = 7,08$ pada taraf signifikansi 1 %. Hasil uji ini merekomendasikan bahwa hipotesis 2 secara empiris dapat diterima keberlakuannya, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian dana bantuan/pinjaman modal usaha kepada kaum perempuan (ibu rumah tangga nelayan) merupakan salah satu faktor pemberdayaan yang dapat mempengaruhi kondisi taraf hidup keluarga mereka, sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan fungsional kedua variabel berpola linear positif.

kecenderungan mengikuti garis Y duga (Y prediksi). Ini berarti bahwa ada ketergantungan Y atas X_2 atau secara matematis dapat digambarkan $Y = f(X_2)$. Ketergantungan taraf hidup keluarga (Y) atas pemberian bantuan modal usaha (X_2) diperlihatkan dari hasil koefisien determinasi (r^2), yakni sebesar 0,842 atau 84,2% kontribusi pemberian bantuan modal usaha terhadap taraf hidup keluarga dan sisanya sebesar 15,8% ditentukan oleh faktor lain.

Dengan mengacu pada persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila harga $X_2 = 1$ juta rupiah, maka dapat diprediksi kondisi taraf hidup keluarga ke depan, yakni $\hat{Y} = -18,226 + 0,071(1000) = -18,226 + 71 = 52,77$ atau dalam skala ideal pengukuran sebesar 1.06 atau 106 %. Dengan demikian, apabila pemberian dana bantuan ditingkatkan dari rata-rata sebesar 770 ribu rupiah menjadi 1 juta rupiah, maka diharapkan terjadi pebaikan/peningkatan kondisi taraf hidup keluarga dari 36,67 (73.34%) menjadi 52,72 atau 106 %. Hal ini mengindikasikan bahwa keluarga kaum perempuan (ibu rumah tangga) di kelurahan sampel cukup efektif dalam menggunakan atau memanfaatkan dana bantuan/pinjaman, baik dari lembaga simpan pinjam perempuan (SPP) yang didanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, maupun lembaga keuangan

mikro lainnya untuk usaha ekonomi produktif dalam rangka membantu pendapatan keluarga.

3. Kontribusi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Terhadap Taraf Hidup Keluarga

Hipotesis 3 berbunyi “Kebijakan pemberdayaan perempuan dari aspek pemberian pendidikan/keterampilan dan pemberian modal usaha secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan taraf hidup keluarga di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.”. Hasil analisis regresi berganda didapat persamaan regresi $\hat{Y} = -5.382 + 0.831X_1 + 0.031X_2$. Setelah dilakukan uji keberartian koefisien regresi dengan menggunakan t-test dan uji model regresi ganda dengan menggunakan F-test (uji keragaman), diperoleh harga t_{hitung} , untuk masing-masing koefisien regresi, yaitu $b_1 = 7,896$; dan $b_2 = 5,307$, sementara t_{tabel} pada taraf signifikansi 1 % diperoleh sebesar 2,660; sedangkan $F_{hitung} = 548,953$ sementara $F_{tabel} = 4,16$ pada taraf signifikansi 1 % dengan dk pembilang 3 dan penyebut 57. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa koefisien-koefisien b_1 dan b_2 signifikan pada taraf uji 1 %. Sedangkan uji keragaman menunjukkan bahwa harga F_{hitung} jauh lebih besar dari harga F_{tabel} pada taraf signifikansi 1 %. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis 3 dapat diterima keberlakuannya secara empiris pada taraf signifikansi 1 % dan hubungan fungsionalnya berpola linear positif.

Selanjutnya, untuk memperediksi kondisi taraf hidup keluarga kedepan apabila harga-harga variabel bebas diubah (dinaikkan/turunkan), di mana $X_1 = 30$ (skor maksimal) dan $X_2 = 1000$ (ribu rupiah). Dengan menggunakan metode interpolasi, maka diperoleh $\hat{Y} = -5.382 + 0.831(30) + 0.031(1000) = -5.382 + 24.93 + 31 = 50.55$ atau dalam skala ideal pengukuran sebesar 1.01 atau 101 %. Ini berarti naik dari 73.34 % menjadi 101 %, dalam arti mengalami

kenaikan sebesar ± 27.66 %. Hasil ini mengindikasikan bahwa ternyata setelah kedua aspek pemberdayaan perempuan (pelatihan/keterampilan dan pemberian modal usaha) dinaikkan sampai maksimal berdasarkan indikator yang ditetapkan, ternyata kondisi taraf hidup keluarga ternyata mencapai skor melenihi skor maksimal. Hal ini berarti bahwa kedua faktor pemberdayaan perempuan tersebut sangat mempengaruhi perbaikan kondisi taraf hidup keluarga, khususnya keluarga para ibu rumah tangga nelayan di pesisir Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kesimpulan hasil analisis data dapat ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan aspek-aspek pemberdayaan perempuan, ternyata memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap perbaikan taraf hidup keluarga, jika penerapannya dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial). Secara parsial, ternyata aspek pelatihan/keterampilan jauh lebih tinggi dibanding aspek pemberian dana bantuan/pinjaman. Sementara itu, apabila kedua aspek tersebut (pelatihan/keterampilan dan pemberian dana bantuan modal usaha) diberdayakan secara bersama-sama (simultan), justru memberikan kontribusi yang jauh lebih besar (bersinergi) terhadap perbaikan kondisi taraf hidup keluarga keluarga, yakni sebesar 0,924 atau 92,4 %. Hasil ini bermakna bahwa meningkatnya taraf hidup keluarga, sebagian terbesar (92,4 %) dipengaruhi secara bersama-sama atau simultan oleh faktor-faktor pemberdayaan perempuan (pelatihan/keterampilan dan bantuan modal usaha) sebesar 92,4 % dan sisanya sebesar 7,6 % ditentukan oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini berimplikasi perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan, khususnya para kaum perempuan (ibu-ibu rumah tangga) dari keluarga miskin, khususnya perempuan nelayan ditinggal dipesisir pantai, agar dapat membantu suami untuk memperbaiki/meningkatkan kondisi taraf hidup keluarganya sehingga dapat

beranjak dari status kemiskinan/prasejahtera menjadi keluarga sejahtera. Untuk itu, upaya pemberdayaan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pemberian dana bantuan/pinjaman modal usaha yang proporsional.

Konsep ini sejalan dengan pendapat T. Scarlet Epstein, dalam Budiman & Ufford (1988) bahwa terjadinya kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya sumber-sumber pembangunan, namun lebih mencerminkan kurangnya pribumi dengan pendidikan, latihan-keterampilan yang memadai, sehingga membuat ketidakmampuannya untuk mengelola sumber-sumber yang tersedia bagi keuntungan bangsa mereka. Oleh karenanya pembangunan tidaklah harus merupakan perpindahan modal dari negara maju kenegara yang kurang berkembang, tetapi lebih banyak di pusatkan pada “pembangunan manusia sebagai sumber daya”.

4. Perbedaan Taraf Hidup Keluarga Antara Sebelum dan Sesudah Pemberdayaan

Hipotesis 4, yang akan diuji berbunyi “Terdapat perbedaan taraf hidup keluarga dari ibu rumah tangga nelayan antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Tahuna Barat kabupaten Kepulauan Sangihe.”.

t_{hitung} diperoleh sebesar -3.681, sedangkan t_{tabel} pada taraf uji 1 % ($\alpha : 0,01$), dari daftar distribusi t, diperoleh $t_{tabel} = 2,660$.

Kriteria : terima H_0 jika $-t_{1-1/2\alpha} < t < t_{1-1/2\alpha}$; ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa harga t_{hitung} berada jauh diluar daerah penerimaan H_0 ($-2,660 > -3,681 < 2,660$). Dengan demikian, hasil penelitian mengusulkan untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Artinya bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat perbedaan taraf hidup keluarga dari ibu rumah tangga nelayan antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe”

dapat diterima keberlakunnya secara empiris dengan sangat meyakinkan.

Hal ini bermakna bahwa kondisi Taraf hidup Keluarga perempuan nelayan pesisir di Kecamatan Tahuna Barat jauh lebih baik setelah implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dibanding sebelum pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kondisi taraf hidup keluarga perempuan nelayan pesisir pasca pemberdayaan diperoleh sebesar 36.67 atau dalam skala ideal pengukuran sebesar 0.73 atau 73 %, sementara kondisi taraf hidup keluarga perempuan nelayan sebelum pemberdayaan rata-rata hanya sebesar 33,53 atau dalam skala ideal pengukuran diperoleh sebesar 0.67 atau 67% saja, sehingga terjadi perbedaan yang sangat nyata, yakni sekitar 6%. Hal ini bermakna bahwa terjadi kenaikan kondisi taraf hidup keluarga perempuan nelayan pesisir di Kecamatan Tahuna Barat pasca implementasi kebijakan pemberdayaan sebesar 6 %. Meningkatnya taraf hidup keluarga perempuan nelayan pesisir pasca implemmtasi kebijakan pemberdayaan perempuan dapat diamati pula dari meningkatnya rata-rata pendapatan keluarga per bulan sebesar Rp. 1.532.500, sementara sebelum pemberdayaan hanya sebesar Rp. 1.371.670 perbulan dengan selisih sebesar Rp. 160.800 rata-rat per bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik bebrapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberdayaan perempuan nelayan pesisir dalam bentuk implementasi program-program pelatihan/keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha bagi ibu-ibu rumah tangga nelayan pesisir, khususnya di Kecamatan Tahuna Barat, masih berada pada kategori “rendah” cenderung “sedang”; sementara kondisi taraf hidup keluarga, juga masih berada pada kategori “rendah” cenderung “sedang”, namun terdapat

peningkatan setelah diimplementasikan program pemberdayaan.

2. Kebijakan pemberdayaan perempuan nelayan pesisir berdampak positif dan signifikan terhadap kondisi taraf hidup keluarga perempuan nelayan pesisir, khususnya di kecamatan Tahuna barat. Naik-turunnya kondisi taraf hidup keluarga dapat dijelaskan melalui variasi pemberdayaan melalui aspek pelatihan/keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha, baik secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan.

3. Kondisi taraf hidup keluarga perempuan nelayan pesisir di kecamatan Tahuna Barat pasca pemberdayaan, jauh lebih baik (tinggi) dibanding sebelum pemberdayaan.

Dengan demikian, semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah teruji keberlakuannya secara empiris sekaligus dapat menjustifikasi teori-teori maupun konsep-konsep yang mendasarinya.

B. Saran-saran

Mengacu pada beberapa temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mengajukan beberapa saran sebagai solusi terbaik dalam memecakan masalah yang dihadapi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup keluarga perempuan nelayan pesisir. Saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengingat semua aspek pemberdayaan perempuan pesisir, seperti pemberian pelatihan/keterampilan dan pemberian dana bantuan/pinjaman modal usaha masih berada pada kategori rendah, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah/intansi terkait untuk mengambil kebijakan konkrit dalam bentuk implementasi program-program pemberdayaan perempuan yang lebih merata dan proporsional serta langsung menyentuh kepentingan para kaum perempuan/ibu-ibu rumah tangga yang ada diwilayah pesisir, khususnya di kecamatan

Tahuna Barat. Salah satu contoh program pemberdayaan yang relevan di kembangkan adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

2. Untuk mengoptimalkan pencapaian perbaikan kondisi taraf hidup keluarga, maka semua aspek pemberdayaan perlu diimplementasikan secara terpadu dan komprehensif sehingga dapat bersinergi untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kaum perempuan nelayan pesisir yang diberdayakan sebagai kelompok sasaran.

3. Mengingat aspek pelatihan/keterampilan dan pemebrian dana bantuan modal usaha lebih dominan mempengaruhi perbaikan kondisi taraf hidup keluarga, maka kedua aspek tersebut perlu diprioritaskan dalam program pemberdayaan, terutama penyediaan dana bantuan/pinjaman tanpa agunan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan modal bagi pengembangan usaha mikro dengan pola kemitraan usaha yang diatur melalui Perkam (Peraturan Kampung).

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2007, Sektor Deputi Peningkatan kualitas hidup perempuan, Kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP).

Darwin, Muhadjir , 2005, *Negara dan Perempuan : Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta Graha Guru.

Singarimbun, dan Efendi, 2003. *Metode Penelitian Survey*, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Sumber Undang – Undang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Pesisir No.03 Tahun 2009 Melalui Progam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Simpan Pinjam Perempuan (SPP).